



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

2023



BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) BBP3KP Triwulan II Tahun 2023 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan LKj Triwulan II Tahun 2023 ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja BBP3KP kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP yang telah membimbing penyusunan LKj serta kepada tim pelaksana kegiatan dan segenap keluarga besar BBP3KP yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di lingkungan BBP3KP dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan BBP3KP di waktu yang akan datang. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Jakarta, 21 Juli 2023
Kepala BBP3KP



Dr. Trisna Ningsih, A.Pi, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4. KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	4
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. RENCANA STRATEGIS	8
2.2. PENETAPAN KINERJA BBP3KP TAHUN 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. CAPAIAN KINERJA	13
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	16
IK 1. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	17
IK 2. Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	19
IK 3. Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	22
IK 4. Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	25
IK 5. Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	29
IK 6. Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	34
IK 7. Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	37
IK 8. Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	40
IK 9. Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	41
IK 10. Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	42

IK 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	44
IK 12. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	47
IK 13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	49
IK 14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	51
IK 15. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%) ...	52
IK 16. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi) ..	54
IK 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	56
IK 18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	58
IK 19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	60
IK 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	61
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	63
3.3.1. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023.....	63
BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2023.....	10
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023.....	13
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing	18
Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan	21
Tabel 5. Rekapitulasi Penyebarluasan Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan pada Triwulan II.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Pencapaian Indikator Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	25
Tabel 8. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM) 29	
Tabel 9. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan.....	33
Tabel 10. Pencapaian Indikator Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan	37
Tabel 11. Pencapaian Indikator Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan	39
Tabel 12. Pencapaian Indikator Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP	40
Tabel 13. Pencapaian Indikator Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	41
Tabel 14. Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP	44
Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP	46
Tabel 16. Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP	49
Tabel 17. Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP	51
Tabel 18. Pencapaian Indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP	52
Tabel 19. Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP	53
Tabel 20. Pencapaian Indikator Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP.55	
Tabel 21. Pencapaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP	58
Tabel 22. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP	60

Tabel 23. Pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP	61
Tabel 24. Pencapaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%).....	62
Tabel 25. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP.....	3
Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Juni Tahun 2023.....	4
Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK Triwulan II Tahun 2023.....	13
Gambar 4. Kegiatan BBP3KP dalam pencapaian target indikator kinerja Bahan RSNI hasil KP pada Triwulan II.....	21
Gambar 5. Kegiatan diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan.....	22
Gambar 6. Rekapitulasi Pengunjung pada Sosial Media BBP3KP.....	24
Gambar 7. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha dalam Inkubator Bisnis.....	28
Gambar 8. Dokumentasi kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran.....	33
Gambar 9. Kegiatan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan.....	36
Gambar 10. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan terhadap SNI.....	36
Gambar 11. Kegiatan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan.....	39
Gambar 12. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Arsip.....	44
Gambar 13. Kegiatan persiapan dan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.....	46
Gambar 14. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP.....	48
Gambar 15. Kegiatan peningkatan profesionalitas ASN BBP3KP.....	49
Gambar 16. Kegiatan dialog kinerja organisasi dan penyusunan dokumen PK.....	50
Gambar 17. Tangkapan Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Tahun 2023.....	53
Gambar 19. Reformulasi IKPA 2023.....	57
Gambar 20. Kegiatan BMN Triwulan II Tahun 2023.....	62

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) BBP3KP selama Triwulan II Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP dan Rencana Strategis BBP3KP Tahun 2020-2024.

Perjanjian kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri atas 8 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja BBP3KP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung per triwulan yaitu: (1) Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, dan (2) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP;
2. Terdapat 2 indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung secara semesteran yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP; dan (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP. Selain itu terdapat 16 indikator kinerja yang pencapaiannya baru dapat dihitung pada akhir tahun, yaitu: (1) Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing; (2) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan; (3) Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis; (4) Pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan; (5) Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan; (6) Nilai PNBK di lingkungan BBP3KP; (7) Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan; (8) Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan; (9) Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP; (10) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); (11) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP; (12) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP; (13) Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBP3KP; (14) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan

BBP3KP; (15) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP; dan (16) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Perlu adanya monitoring dan evaluasi mengenai kebermanfaatan hasil-hasil kegiatan BBP3KP di masyarakat;
2. Perlu untuk meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait integrasi pelaksanaan program dan kegiatan agar terarah dan bersinergi, dalam lingkup BBP3KP, Ditjen PDSPKP, KKP, dan dengan pemerintah daerah; dan
3. Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas disini diartikan sebagai perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tahapan penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Penyusunan Rencana Strategis, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Review dan Evaluasi Kinerja.

Pelaporan Kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan selama Triwulan II tahun 2023.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaan BBP3KP didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

BBP3KP memiliki tugas pokok melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

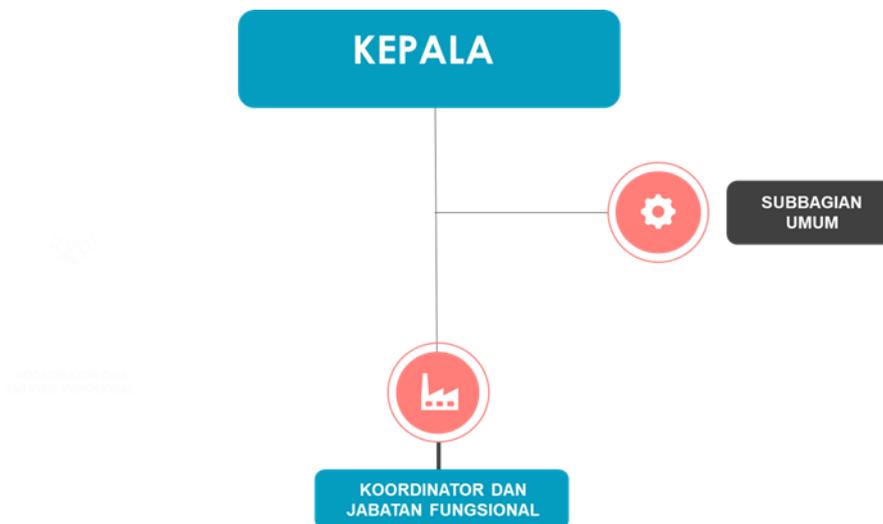
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c) Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e) Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BBP3KP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subbag Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi BBP3KP diatur seperti pada Gambar 1.

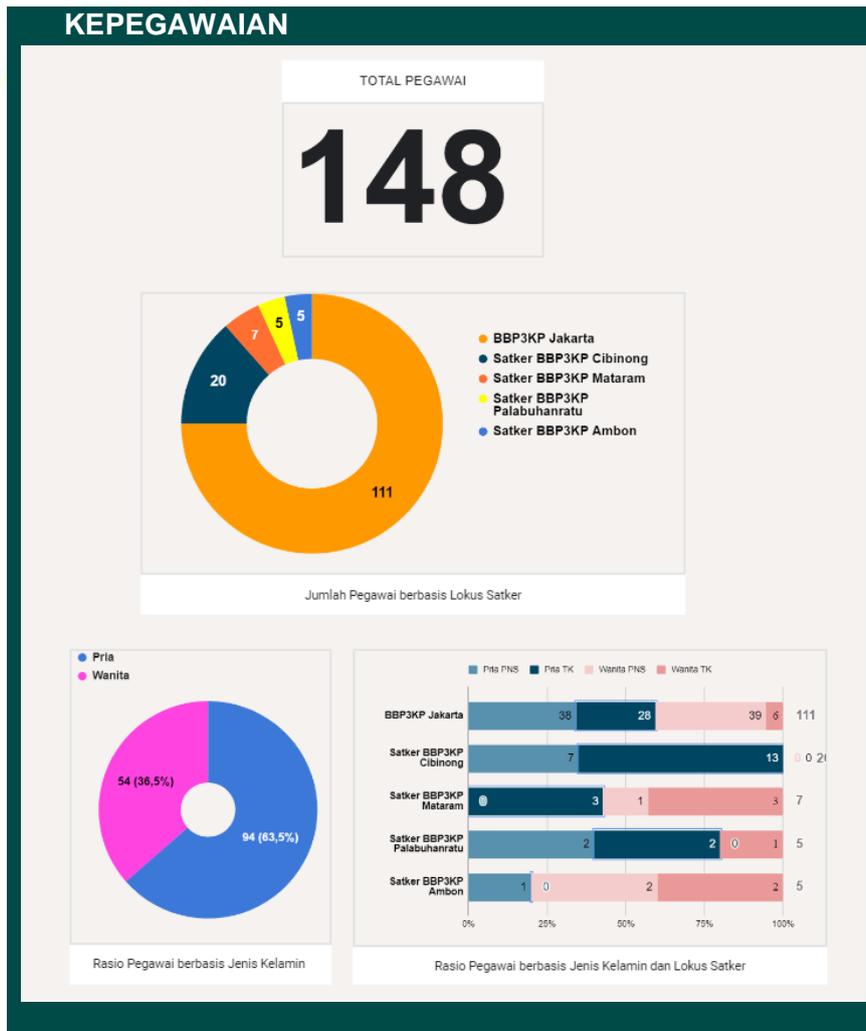


Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP

Berdasarkan Permen KP No. 68 Tahun 2020, pada BBP3KP dibentuk 4 satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, yang berlokasi di Cibinong, Palabuhanratu, Mataram, dan Ambon. Keempat satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha produk kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh pengelola satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

1.4. KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2023, jumlah pegawai BBP3KP per akhir Juni Tahun 2023 adalah sebanyak 148 orang, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Juni Tahun 2023

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan diantaranya: (a) Kapabilitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, (b) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), (c) Mutu produk kelautan dan perikanan, (d) Susut hasil dan pemanfaatan hasil samping dalam penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, (e) Ketahanan pangan, (f) Ancaman *stunting*, (g) Peluang pemanfaatan inovasi *Blue Economy*, (h) Perkembangan teknologi, (i) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (j) Perubahan iklim dunia.

Kapabilitas pelaku UMKM pengolahan dan pemasaran, sebagian besar belum dapat mencapai skala ekonomis. Volume produk olahan yang diperjualbelikan per satuan waktu tidak begitu banyak, sementara pengerjaannya sering menghabiskan waktu seharian dan melibatkan beberapa orang. Kondisi ini adalah *unsteady-state* bisnis, di mana tidak terjadi perimbangan yang layak pada *benefit-cost* dan *net present value* usaha.

Dari sisi mutu, produk kelautan dan perikanan dihadapkan pada tantangan pemenuhan perubahan standar mutu pangan yang berlaku di pasar. Untuk mempertahankan posisi tawar dan menjamin penerimaan produk kelautan dan perikanan di pasaran, maka setiap standar yang berlaku harus dipenuhi. Keterampilan penanganan mutu dan keunikan cita rasa produk Indonesia dengan dukungan pembinaan mutu intensif dari pemerintah diyakini dapat menjawab tantangan standar mutu tersebut. Pembinaan penerapan standar dan sertifikasi mutu dinilai strategis membantu pembenahan internal yang dihadapi pelaku usaha.

Isu mikroplastik pada produk maupun kemasan akan berpengaruh penting dalam pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kontaminasi monomer dari kemasan berbahan plastik dapat membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan teknologi yang menggantikan kemasan yang berbahan baku plastik.

Pengaruh teknologi cenderung positif karena mengintroduksi konsep Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital. Penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk secara digital dapat mempercepat pertumbuhan usaha perikanan. Muatan digitalisasi usaha, perizinan/sertifikasi *online*, pembinaan dan diseminasi secara *online* akan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan.

Beberapa faktor internal yang berpengaruh diantaranya adalah (a) Ketersediaan anggaran, (b) Sumber Daya Manusia, dan (c) Keragaman kebutuhan para penerima manfaat dari kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Anggaran merupakan prasyarat dasar pelaksanaan kegiatan. Peningkatan layanan pengujian membutuhkan peralatan yang beroperasi dengan baik dan memberikan hasil yang cepat serta akurat. Anggaran untuk kegiatan kalibrasi maupun perbaikan peralatan yang rusak perlu dipastikan ketersediaan dan kecukupannya. Anggaran yang memadai juga dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan diseminasi dan *upgrading* perangkat lunak untuk penyusunan media informasi.

Dalam hal SDM, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi SDM eksisting membutuhkan perhatian untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Mengikuti perkembangan teknologi, dibutuhkan lebih banyak SDM yang dapat memanfaatkan peralatan berbasis teknologi informasi. Penyiapan generasi pengganti melalui rekrutmen pegawai baru yang berkompeten juga merupakan keharusan karena sebagian SDM yang saat ini aktif akan memasuki usia purnabakti dalam beberapa tahun ke depan.

Penerima manfaat dari kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu penerap inovasi, klien LSPPro-HP, dan tenant Inkubator Bisnis Inovasi Produk. Setiap kelompok memiliki keragaman tinggi dalam hal kebutuhan dan harapan akan bantuan dan bimbingan yang diberikan. Kemampuan mengidentifikasi masalah serta solusi yang dapat ditawarkan kepada masing-masing penerima manfaat dari kegiatan adalah tantangan bagi BBP3KP untuk terus dapat meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan berbagai isu strategis tersebut, BBP3KP menetapkan sasaran dan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PDSPKP dan Kepala BBP3KP.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja BBP3KP selama Triwulan II tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKj BBP3KP

mengacu pada
Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun
2014

Bab I Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2022 dan analisisnya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BBP3KP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, menyajikan Perjanjian Kinerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan merumuskan tujuan pembangunan selama lima tahun, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing, dari 60% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2024.
2. Meningkatnya produk kelautan dan perikanan berdaya saing untuk konsumsi masyarakat. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan jumlah produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat, dari 30 produk pada tahun 2020 menjadi 50 produk pada tahun 2024.
3. Meningkatnya nilai LKE Pembangunan ZI menuju WBK BBP3KP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai LKE Pembangunan ZI menuju WBK BBP3KP, dari 75 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024, atau dengan kata lain, perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2024.
4. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA BBP3KP, dari 88 pada tahun 2020 menjadi 92 pada tahun 2024.

2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BBP3KP sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan kegiatan dalam program nilai tambah dan daya saing industri serta program dukungan manajemen di Ditjen PDSPKP. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Sasaran: Pelaku usaha kelautan dan perikanan inovatif dan berdaya saing. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah persentase

pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2024.

- b. Sasaran: Produk kelautan dan perikanan berdaya saing untuk konsumsi masyarakat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat meningkat dari 30 produk pada tahun 2020 menjadi 50 produk pada tahun 2024.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan BBP3KP. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- a. Indeks profesionalitas ASN BBP3KP, meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- b. Persentase unit kerja BBP3KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- c. Nilai rekonsiliasi kinerja BBP3KP, meningkat dari 85 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024;
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BBP3KP, meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- e. Nilai WBK BBP3KP, meningkat dari 75 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024;
- f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBP3KP, meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024.

2.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mendukung dua dari enam arah kebijakan Ditjen PDSPKP, yaitu meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing dan meningkatkan konsumsi ikan, BBP3KP menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan teknologi inovasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan penyiapan Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan dan perikanan;

3. Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatkan penyebaran informasi dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan 4 (empat) arah kebijakan di atas, BBP3KP menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh level unit kerja. Di samping itu, BBP3KP melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan transformasi digital.

2.2. PENETAPAN KINERJA BBP3KP TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Sejak tahun 2013, penetapan kinerja pada unit kerja lingkup BBP3KP telah didasarkan pada konsep manajemen kinerja berbasis BSC.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta indikator kinerja kegiatan yang diharapkan dicapai oleh BBP3KP pada Triwulan II Tahun 2023 seperti tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja BBP3KP pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	1 Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	2 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3
3	Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	3 Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	4 Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50

	Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	5	Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	6	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
		7	Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
6	Nilai PNBPN Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP	8	Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0.585
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	9	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450

KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP

DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP	10	Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75
		11	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75
		12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82.9
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80.5
		14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0.5
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75
		16	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77.5
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77.5

BBP3KP mempunyai output kegiatan sesuai dokumen Rencana Kerja TA 2022 pada aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai berikut:

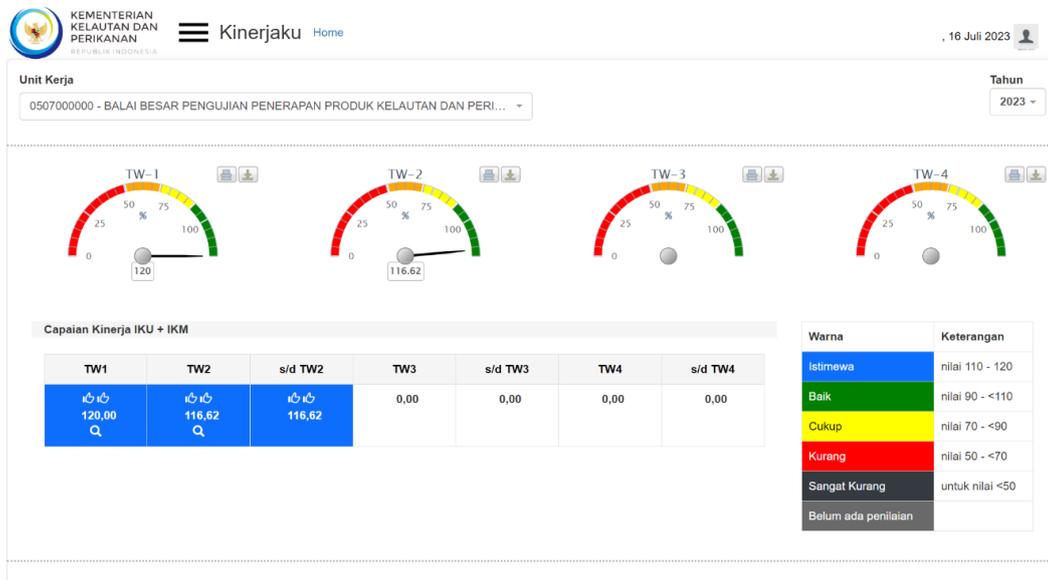
- 1) UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis, sebanyak 50 UMKM;
- 2) UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP, sebanyak 40 UMKM;
- 3) Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP, sebanyak 1.000 orang;
- 4) Layanan Sertifikasi Produk, sebanyak 1 layanan;
- 5) Layanan Pengujian Produk, sebanyak 1 layanan;
- 6) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP, sebanyak 3 produk;
- 7) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BBP3KP yang disediakan, sebanyak 10 unit;
- 8) Layanan Umum, sebanyak 1 layanan;
- 9) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, sebanyak 1 layanan;
- 10) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sebanyak 1 layanan;
- 11) Layanan Manajemen Keuangan, sebanyak 1 layanan;
- 12) Layanan Sarana Internal, sebanyak 151 unit; dan
- 13) Layanan Perkantoran, sebanyak 1 layanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan BBP3KP dari bulan April sampai dengan Juni 2023. BBP3KP telah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Nilai rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBP3KP sebesar 116,62% dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK Triwulan II Tahun 2023

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP. Capaian masing-masing Indikator Kinerja pembentuk NPSS diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REA-LISASI	%TERHADAP TARGET		
			TAHUN 2023	TW II 2023		TAHUN 2023	TW II 2023	
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	1	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan	67.5	0	0	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET	
				TAHUN 2023	TW II 2023		TAHUN 2023	TW II 2023
			Berdaya Saing (%)					
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	2	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3	0	0	-	-
3	Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	3	Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.000	500	676	67,6	135,2
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	4	Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50	0	0	0	-
		5	Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40	0	0	0	-
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	6	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	-
		7	Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	-
6	Nilai PNBPN Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP	8	Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0.585	0	0	0	-
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	9	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450	0	0	0	-
8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan	10	Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75	0	0	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET	
				TAHUN 2023	TW II 2023		TAHUN 2023	TW II 2023
	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP	11	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75	0	0	-	-
		12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82,9	76	80,57	97,19	106,01
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80,5	0	0	-	-
		14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0,5	0	0	-	-
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75	75	100	133,33	133,33
		16	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1	0	0	-	-
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89	82	93,10	104,61	113,54
		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86	0	0	-	-
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	0	0	-	-
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	0	0	-	-

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja BBP3KP pada setiap Sasaran Kegiatan dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BBP3KP. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Upaya tersebut tercermin dari kegiatan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, penyusunan bahan RSNI, pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan, serta pelayanan pengembangan usaha. Tahun 2023, BBP3KP mempunyai 20 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing, (2) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan, (3) Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, (4) Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis, (5) Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, (6) Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan, (7) Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan, (8) Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP, (9) Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan, (10) Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP, (11) Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP, (12) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP, (13) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP, (14) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP, (15) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP, (16) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP, (17) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP, (18) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP, (19) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP, dan (20) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.2.1

Sasaran Kegiatan 1 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 1. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)

Pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang difasilitasi oleh BBP3KP dalam kegiatan inkubasi bisnis; pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran; serta pelayanan sertifikasi produk yang memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Indikator keberhasilan pelaku usaha yang inovatif jika memenuhi kriteria diantaranya (a) memiliki nilai tambah melalui ragam diversifikasi produk, (b) memiliki kemasan sesuai persyaratan, (c) terpenuhinya perbaikan dalam proses produksi dan mutu produk, (d) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, dan (e) menerapkan syarat mutu penanganan sesuai SNI untuk produk ikan hias. Indikator keberhasilan pelaku usaha yang berdaya saing jika memenuhi kriteria diantaranya (a) memperoleh sertifikat kesesuaian SNI, (b) memiliki identitas atau merek yang terdaftar, (c) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dibuktikan dengan hasil uji, sertifikat seperti Halal, GMP-SSOP, HACCP, MD, maupun SPPT SNI, (d) memiliki perizinan berusaha seperti NIB, P-IRT, (e) meningkatnya keberterimaan pasar, (f) memiliki wilayah pasar dan jangkauan pemasaran yang luas, (g) aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan.

Penghitungan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdaya saing (%PIDS) sebagai berikut:

$$\% \text{ PIDS} = [(A1/A2) \times 30\% + (B1/B2) \times 30\% + (C1/C2) \times 40\%]$$

Keterangan masing-masing kode pada penghitungan diatas yaitu A1 (Jumlah pelaku usaha yang memenuhi indikator keberhasilan dengan nilai minimal 81 (berhasil dengan baik), A2 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Inbis Invapro KP), B1 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran yang memenuhi indikator keberhasilan yang dipersyaratkan (≥ 75), B2 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi teknik pengolahan dan pemasaran), C1 (Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI) dan C2 (Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi).

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5	-	70	-	-	-	-	-	

Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Penghitungan %PIDS tidak terdapat pada dokumen PK BBP3KP tahun 2022, namun tetap dilakukan penghitungan dengan nilai 71,58% dari target jangka menengah sebesar 65%. Untuk tahun 2021, nilai capaian indikator kinerja %PIDS yaitu 68,26% dari target 62,5%.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- a. Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP UMKM Pawonkoe di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 12-14 Juni 2023; UMKM Bandeng Presto Bu Rita di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tanggal 14-16 Juni 2023; dan UMKM Citra Snack dan UMKM Saputra Snack di Bontang, Kalimantan Timur tanggal 22 - 24 Juni 2023.
- b. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan produk pie rumput laut, dendeng tuna siap saji, cookies tuna, dan abon lembaran di UMKM Mekar Bahari dan UMKM Lagundi, Pulau Wangi-Wangi, serta UMKM Matahari, Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi tanggal 19-23 Juni.
- c. Evaluasi sertifikasi awal produk bakso ikan (UKM Bale Bahari), otak-otak ikan (UD Star Food), pempek ikan (CV Honey Group), produk bakso ikan (CV Samara Food), siamay ikan dan nugget ikan (CV Samara Food).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini secara rinci dijelaskan pada indikator kinerja inkubasi bisnis, pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran, dan pelayanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan.

3.2.2

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 2. Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)

Standar minimal mutu dan keamanan bahan pangan selalu berkembang mengikuti tuntutan konsumen. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan masalah gizi, manfaat bahan pangan, dan keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Bahan pangan dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan memenuhi standar keamanan lebih diminati oleh konsumen. Keamanan pangan sangat tergantung pada pelaku industri dalam mengolah bahan pangan serta peran (kebijakan) pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan pada produk pangan. Salah satu peran pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan produk pangan adalah dengan standarisasi.

Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Komite Teknis. Komite Teknis melaksanakan kaji ulang minimal 1 kali dalam lima tahun setelah SNI ditetapkan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI. Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI.

BBP3KP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk dibahas dalam rapat teknis dan rapat konsensus bersama dengan Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non Pangan.

Berdasarkan Rapat Program Nasional Perumusan Standar yang dilakukan oleh Ditjen PDSPKP dan Komite Teknis, BBP3KP ditetapkan untuk melakukan penyusunan 4 bahan RSNI antara lain (1) Revisi SNI *Cephalopoda* beku; (2) Revisi SNI 7762:2013 Amplang Ikan; (3) SNI Ikan Hias *Flying Fox*; dan (4) SNI Ikan Hias Sepat Mutiara. BBP3KP juga melakukan kolaborasi dengan Kelompok Standarisasi dalam penyusunan Revisi SNI 7266: 2017 Bakso Ikan dan Revisi SNI 2721:2016 Ikan Asin Kering.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Identifikasi dan pengumpulan data yang diambil dari pelaku usaha suplayer ikan hias asli Jambi yang berada di sekitar Kota Jambi serta pengumpul di seputaran wilayah sungai Batang Hari yaitu di daerah Tanjung Johor Kec. Pelayangan Kota Jambi, Telanaipura dan Tathtulyman seberang Kota Jambi;
2. Rapat teknis pembahasan RSN1 Produk Perikanan Nonpangan:
 - a. SNI Ikan Hias Sepat Mutiara (*Trichopodus leerii*) - Syarat Mutu dan Penanganan dengan konseptor Rachmat Fadillah dan Grace Octavia yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.
 - b. Pembahasan RSN1 Produk Perikanan Nonpangan untuk SNI Ikan Hias Flying Fox (*Epalzeorhynchus kalopterum*) - Syarat Mutu dan Penanganan dengan konseptor Nur Kholik dan Akhri Yulianto dilaksanakan pada Kamis 13 April 2023.
3. Pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan RSN1 ikan hias Sepat Mutiara dan *Flying Fox* di kota Jambi pada tanggal 16 Mei 2023, dengan mengunjungi 2 (dua) pelaku usaha ikan hias “Johor Jaya Ikan Hias” dan “Indomina Aquarium”.
4. Penyusunan dan pembahasan Bahan RSN1 1 serta penyusunan Bahan RSN1 2 untuk produk perikanan dan produk non pangan serta melakukan koordinasi data pengujian dengan Laboratorium daerah terkait produk cephalopoda beku, amplang ikan, bakso ikan, ikan krustasea echinodermata moluska asin kering.
5. Pelaksanakan rapat pembahasan bahan RSN1 2 produk kelautan dan perikanan di Raiser Ikan Hias Cibirong tanggal 6 Juni 2023.
6. Rapat teknis Pembahasan RSN12 Produk Perikanan Komite Teknis 65-05 yang diselenggarakan tanggal 12-15 Juni 2023. Pada rapat teknis ini dilakukan pembahasan RSN12 amplang ikan dan sepelopoda beku.
7. Rapat teknis pembahasan RSN12 Produk Perikanan Non Pangan Komite Teknis 65-08 diselenggarakan tanggal 19-22 Juni 2023.



Kunjungan di pengumpul ikan Flying fox di Tanjung Johor, Jambi

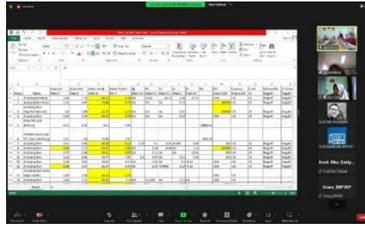


Identifikasi dan Pengumpulan data ikan hias Sepat Mutiara dan *Flying Fox*





Rapat pembahasan bahan RSNI 2 produk kelautan dan perikanan di Raiser Ikan Hias Cibinong



Rapat teknis Pembahasan RSNI2 Produk Kelautan dan Perikanan (Komite Teknis 65-05 dan 65-08)

Gambar 4. Kegiatan BBP3KP dalam pencapaian target indikator kinerja Bahan RSNI hasil KP pada Triwulan II

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi pada Triwulan II yaitu perlu data dukung lebih banyak untuk penyempurnaan lampiran normatif dan informatif pada dokumen RSNI. Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/ rekomendasi yang dilakukan BBP3KP adalah (a) Melengkapi data dukung sesuai dengan masukan komite teknis; dan (b) Melaksanakan kunjungan dan identifikasi di lapangan serta menambah data dukung melalui pengujian laboratorium.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3	-	3	-	-	-	-	-	

Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan ditargetkan sebanyak 3 produk pada tahun 2023. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3 rekomendasi kebijakan dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 3 bahan RSNI.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp88.876.592,- atau setara dengan 29,63% dari total pagu sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3.2.3

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 3. Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)

Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan ditujukan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi hasil uji terap berupa ragam produk/alat/mesin/desain layout maupun pengujian dan sertifikasi produk kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan media informasi sebagai bahan/peraga dan penyebarluasan informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan.

Penyusunan media informasi merupakan kegiatan pembuatan dan pencetakan media informasi. Bahan penyusunan media informasi tersebut merupakan hasil-hasil inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk. Tujuan pembuatan media informasi adalah sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan hasil inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha perikanan dengan harapan dapat diketahui, diadopsi dan diterapkan.



Kegiatan Pasar Ikan Murah
Ramdhan di PIM Soreang,
Bandung



Kegiatan International
Indonesia Seafood and Meat
(IISM) Expo 2023



Kegiatan Diseminasi
Diversifikasi Produk Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Cirebon



Diseminasi Diversifikasi
Produk Kelautan dan
Perikanan di Kota Batam



Penyebarluasan informasi
melalui Pekan Nasional
(PENAS) di Kota Padang



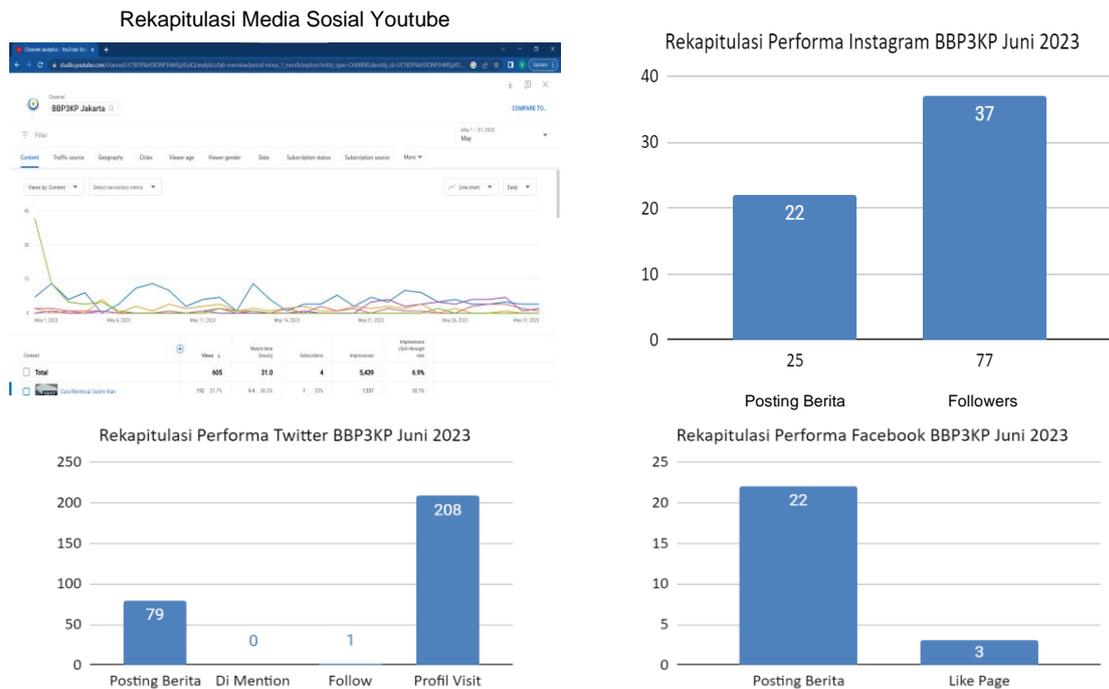
Kegiatan Sea Indonesia
Maritime One Stop Shop
(MOSS)

Gambar 5. Kegiatan diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan

Penyebarluasan informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan terdiri dari kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar, demonstrasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan, merupakan upaya untuk memperkenalkan atau mempromosikan hasil-hasil inovasi/perekayasaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas. Demonstrasi produk kelautan dan perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung/praktek tentang tata cara pembuatan produk hasil perikanan, yang dipandu oleh instruktur atau narasumber yang kompeten di bidangnya melalui kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar dengan target peserta/pengunjung. Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di Negeri Wakasihu Maluku Tengah tanggal 04 April 2023 dengan jumlah penerima informasi 16.
2. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Pasar Ikan Murah Ramadhan di Pasar Ikan Modern Sabilulungan Soreang Bandung tanggal 14-15 April 2023 dengan jumlah penerima informasi 25.
3. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Hari Laut Sedunia di Kota Batam tanggal 9 Mei 2023.
4. Penyebarluasan informasi pada kegiatan International Indonesia Seafood and Meat (IISM) Expo di JIExpo Kemayoran Jakarta tanggal 10-13 Mei 2023 dengan jumlah penerima informasi 162.
5. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Sea Indonesia di JIExpo Kemayoran Jakarta tanggal 15-17 Mei 2023 dengan jumlah penerima informasi 92.
6. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVI di Kota Padang tanggal 10-15 Juni 2023 dengan jumlah penerima informasi 60.
7. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Bimtek Pengolahan Produk Hasil Perikanan di BBI Kota Sukabumi tanggal 14-15 Juni 2023 dengan jumlah penerima informasi 56.
8. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Kab. Cirebon dengan jumlah penerima informasi tanggal 19 Juni 2023 dengan jumlah penerima informasi 30.
9. Penyebarluasan informasi pada kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Kab Sukabumi dengan jumlah penerima informasi tanggal 23 Juni 2023 dengan jumlah penerima informasi 30.

Website BBP3KP merupakan salah satu media penyebarluasan informasi yang dimiliki oleh BBP3KP guna untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan internal ataupun eksternal yang melibatkan BBP3KP. Dalam rangka meningkatkan performa dari *website* tersebut, maka terus dilakukan upaya untuk peningkatan dari konten *website* itu sendiri. BBP3KP juga memanfaatkan sarana media sosial dalam proses penyebaran informasinya melalui akun Twitter (@bbp3kp), Facebook (Balbes dan Fan Page Bbp3kp Jakarta), Instagram (@bbp3kp), dan Youtube (BBP3KP Jakarta).



Gambar 6. Rekapitulasi Pengunjung pada Sosial Media BBP3KP

Faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini pada Triwulan II yaitu tingginya antusias peserta diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan secara intensif terkait penyelenggaraan event penyebarluasan informasi produk kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat kendala yang dihadapi yaitu kesulitan mendapatkan foto/dokumentasi produk yang akan dijadikan sebagai media informasi. Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/ rekomendasi yang dilakukan BBP3KP yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok lingkup BBP3KP.

Tabel 5. Pencapaian Indikator Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000	500	900	676	135,2	67,6	75,11	1251	-45,96

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 676 orang. Capaian ini setara dengan 135,2% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 500 orang atau 67,6% terhadap target tahun 2023 yakni 1.000 orang. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 (900 orang), maka capaian ini telah mencapai 75,11%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 yakni 1251 orang, maka capaian triwulan II tahun 2023 turun sebesar 45,96%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp213.363.736,- atau setara dengan 21,34% dari total pagu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3.2.4

Sasaran Kegiatan 4

Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja.

IK 4. Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)

Fasilitasi inkubasi bisnis pengembangan usaha dilakukan oleh BBP3KP sebagai bentuk pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan atau yang disingkat Inbis Invapro-KP adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*). Kegiatan inkubasi bisnis ini didukung oleh Perpres No.27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, dan Peraturan Direktorat Jenderal PDSPKP No. 26

tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP).

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 50 (lima puluh) UMKM pengolah produk pangan dan non pangan serta pemasar hasil perikanan yang mendapat fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha. Target 50 UMKM tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) tenant baru tahun 2023 dan 29 (dua puluh sembilan) tenant tahun 2022 yang memasuki masa inkubasi tahun kedua. Pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP terdiri dari tahapan pra Inkubasi, Inkubasi dan pasca Inkubasi. Pada tahap Inkubasi dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada Tenant oleh Tim Inbis Invapro-KP BBP3KP dengan melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Tahap inkubasi diatas berupa:

- 1) Bimbingan teknis pengembangan usaha
 - a. Workshop pembekalan program Inbis Invapro-KP
 - b. Bimbingan teknis diversifikasi produk
- 2) Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Pendampingan pengembangan produk
 - b. Pendampingan penerapan jaminan mutu
 - c. Pendampingan manajemen usaha dan keuangan (*action plan, business model canvas*, pembukuan, dan analisa usaha)
 - d. Fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi (NIB, P-IRT, SKP, HACCP, SNI, MD, Halal)
 - e. Fasilitasi pengembangan desain dan kemasan berupa pembiayaan desain, bahan dan label kemasan produk, dan pencantuman informasi nilai gizi
 - f. Fasilitasi promosi dan pemasaran
- 3) Monitoring dan Evaluasi

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah terlaksananya pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha Tenant Inkubasi Bisnis Invapro-KP melalui:

- 1) Kelas GMP SSOP tenant inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan BBP3KP. Pembukaan kelas GMP dilaksanakan tanggal 3 April 2023 melalui *zoom meeting* yang dihadiri oleh semua tenant 2023 dan tim Inbis Invapro-KP. Adapun Penyusunan panduan mutu untuk produk Tuna Suwir tenant Mangathat Malang tanggal 3 Mei 2023, Produk sambal tenant Pawonkoe pada tanggal 5 Mei 2023, produk Petekres tenant PT Rizki Prima Food pada tanggal 25 Mei 2023, produk

sambal ikan tenant PT Rumah Kuliner Indonesia pada tanggal 24 Mei 2023, dan produk rendang ikan tenant Uniadek pada tanggal 26 Mei 2023.

- 2) Fasilitasi pengujian produk Tenant Inbis Invapro-KP dan uji penerimaan pasar.
- 3) Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Tenant Inbis Invapro KP di UPI UMKM Mekar Melati, Kediri dan UPI Tenant Mangathat, Malang, Jawa Timur tanggal 17-19 Mei 2023.
- 4) Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP di Kabupaten UMKM Dapur Way Kanan, Lampung tanggal 12-14 Juni 2023. Diperlukan pendampingan penyusunan Panduan Mutu agar usulan sertifikat GMP/SKP produk yang dihasilkan disetujui.
- 5) Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP UMKM Pawonkoe di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 12-14 Juni 2023; UMKM Bandeng Presto Bu Rita di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tanggal 14-16 Juni 2023; dan UMKM Citra Snack dan UMKM Saputra Snack di Bontang, Kalimantan Timur tanggal 22 - 24 Juni 2023.
- 6) Pendampingan kelas pemasaran digital tanggal 20 Juni 2023 yang dihadiri oleh Koordinator Kelompok PPU, Subkoordinator SPU, Co-Founder Yayasan Dreamdelion Indonesia, Tim Dreamdelion, Tim Inbis Invapro-KP, Pendampingan Dinas KP Kab/Kota, serta 50 Tenant Inbis Invapro-KP.



Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Tenant Inbis Invapro KP di Kediri Jawa Timur



Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Tenant Inbis Invapro KP di Malang Jawa Timur



Kelas GMP SSOP Tenant Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan BBP3KP Tahun 2023

Analisa Usaha: Nila Crispy UKM SARMLA

1. Mengidentifikasi/menentukan Biaya Investasi, Biaya Tetap, Biaya Tidak Tetap

No. Jenis Perilaku	Volume	Harga Satuan/Barat	Harga	Dimur	El Pengawasan
1. Biaya Perilaku	2 unit	1.000.000	2.000.000	240	27.500
2. Biaya Perilaku	2 unit	1.000.000	2.000.000	80	88.800
3. Biaya Perilaku	2 unit	1.000.000	2.000.000	36	27.778
4. Biaya Perilaku	2 unit	150.000	300.000	90	8.833
5. Biaya Perilaku	2 unit	800.000	1.600.000	60	28.333
6. Biaya Perilaku	10 unit	10.000	100.000	12	3.750
7. Biaya Perilaku	12 unit	50.000	600.000	80	8.887
8. Biaya Perilaku	8 unit	40.000	320.000	24	5.000
9. Biaya Perilaku	10 unit	18.000	180.000	24	3.000
10. Biaya Perilaku	5 unit	35.000	175.000	50	2.917
11. Biaya Perilaku	2 unit	50.000	100.000	36	2.778
12. Biaya Perilaku	5 unit	98.000	490.000	60	4.567
Jumlah				28.833.000	278.800



Kelas Analisa usaha Tenant Inbis Invapro-KP BBP3KP tanggal 31 Mei 2023, 6 Juni 2023 dan 8 Juni 2023



Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP di Kabupaten Way Kanan, Lampung



Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur



Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah



Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tenant Inbis Invapro-KP di Bontang, Kalimantan Timur

Gambar 7. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha dalam Inkubator Bisnis

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan triwulan I telah ditindaklanjuti pada triwulan II. Petunjuk teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan telah disahkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor 68 Tahun 2023 tanggal 4 April 2023.

Tabel 6. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50	-	26	-	-	-	-	-	

Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis ditargetkan sebanyak 50 UMKM pada tahun 2023. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 yaitu 24 UMKM dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 26 UMKM.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp1.726.306.773,- atau setara dengan 49,32% dari total pagu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

IK 5. Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mendorong nilai tambah produk kelautan dan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha dan masyarakat. Ruang lingkup pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran kepada koperasi dan pelaku usaha mikro kecil difokuskan pada isu strategis dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi yang mendapatkan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran antara lain dilakukan melalui (a) perbaikan dalam proses produksi, (b) perbaikan mutu produk, (c) diversifikasi produk bernilai tambah, (d) pengadopsian teknologi, (e) uji penerimaan dan perluasan pasar, dan (f) uji preferensi konsumen. Indikator keberhasilan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran meliputi (a) terpenuhinya perbaikan dalam proses produksi, (b) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, (c) terpenuhinya mutu produk sesuai persyaratan, dan (d) meningkatnya keberterimaan pasar.

Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - Pembentukan tim pelaksana kegiatan
 - Pengumpulan data dan informasi
- b. Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
 - Identifikasi dan penyusunan daftar usulan
 - Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
- c. Penetapan pelaku usaha
 - Penyusunan daftar pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
 - Penentuan terhadap calon pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
 - Penetapan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
- d. Penetapan jenis fasilitasi pendampingan
- e. Pelaksanaan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran
- f. Monitoring pendampingan, evaluasi pendampingan dan pelaporan

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- a. Verifikasi 40 calon UMKM yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan secara online melalui *zoom meeting*.
- b. Melakukan rapat internal terkait penyempurnaan petunjuk teknis Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran serta inventarisasi dan rekapitulasi surat pernyataan dan profil pelaku usaha/UMKM yang telah diisi oleh pelaku usaha/UMKM.
- c. Uji coba pengolahan sterilisasi produk bandeng presto dan ketam isi.
- d. Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran pada UMKM berikut:
 - i. Pendampingan teknik pengolahan dilakukan untuk produk abon lembaran dan pengolahan bakso ikan patin kepada UMKM Posdaya Trampil Mandiri, Kabupaten Karanganyar dengan memperkenalkan proses *leaching* guna memperbaiki kualitas produk bakso ikan patin yang dihasilkan pada 4-7 Mei 2023.
 - ii. Penyampaian metode pasteurisasi dan sterilisasi kepada UMKM Prima Rasa Utama, Kabupaten Karanganyar sebagai alternatif metode untuk memperpanjang umur simpan produk pada 4-7 Mei.

- iii. Diversifikasi produk fish chip patin dan krispi ikan mas di UMKM Nila Oscar Kab. Purwakarta, Kota Bandung pada 10-12 Mei;
- iv. Diversifikasi produk seaweed Flake (ulva) di UMKM Noribet, Kota Bandung pada 10-12 Mei;
- v. Penyampaian metode pasteurisasi dan sterilisasi produk bandeng presto dan otak otak bandeng di UD. Multi Sarana Niaga, Kabupaten Gresik pada 10-12 Mei;
- vi. Pendampingan teknik pengolahan produk egg roll ketam/rajungan, almond crispy rajungan dan petis dari hasil samping pengolahan produk ketam di UKM Adena Berkah Mandiri, Kabupaten Belitung pada 14-16 Mei;
- vii. Pendampingan teknik pengolahan produk egg roll udang, shrimp spring tail on, samosa ikan dan shrimp roll di Poklamsar Balo Makmur, Kabupaten Belitung pada 14-16 Mei;
- viii. Pendampingan teknik pengolahan produk bakso ikan air laut dan air tawar di UMKM Sinar Kamilah Kab. Bekasi tanggal 10 Mei;
- ix. Pendampingan teknik pengolahan amplang ikan dan demo diversifikasi produk pilus ikan air tawar di UMKM Home Made Al Amin Kabupaten Kapuas tanggal 22-24 Mei;
- x. Pendampingan teknik pengolahan bandeng presto dengan metode pasteurisasi dan sterilisasi di Kabupaten Karawang tanggal 22-24 Mei;
- xi. Diversifikasi produk baso kering, surimi dan kamaboko di Poklamsar Shanaya tanggal 22-24 Mei;
- xii. Diversifikasi produk pindang/bandeng berbumbu dengan kemasan vakum dan proses sterilisasi di UKM Maranti Kabupaten Sukabumi tanggal 25-27 Mei;
- xiii. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dendeng bandeng utuh asap menggunakan teknik asap cair dan pembinaan terkait metode pasteurisasi di Poklamsar Srikandi Morojaya dan Poklamsar Mitra Kaliwungu Sejahtera, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tanggal 13-14 Juni;
- xiv. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan produk nori dari rumput laut *Gracillaria sp* dan produk agar strip di UMKM Nur Food, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tanggal 15-16 Juni;
- xv. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan produk bakso ikan, abon ikan, pelatihan cara pengolahan surimi di UMKM Raja Ikan, Kuala Kampar, Kab Pelalawan, Riau tanggal 13-15 Juni;

- xvi. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan produk abon ikan lebaran dan bakso ikan lele di UMKM Cipta Mina Boga di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 14-16 Juni;
- xvii. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan produk pie rumput laut, dendeng tuna siap saji, cookies tuna, dan abon lebaran di UMKM Mekar Bahari dan UMKM Lagundi, Pulau Wangi-Wangi, serta UMKM Matahari, Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi tanggal 19-23 Juni;
- xviii. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan keripik kulit ikan di UMKM A2S Pikkul dan pengolahan stik kulit ikan tenggiri dan pilus kulit ikan tenggiri di UMKM RDR, Kota Bengkulu tanggal 21 - 23 Juni;
- xix. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dimsum ikan dan naget ikan, UMKM Putri Unggul, Kab. Purbalingga dan UMKM Suka Nicky di Kab. Banjarnegara tanggal 21-23 Juni.



Verifikasi calon UMKM yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran



Rapat pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan pendampingan teknik pemasaran



Uji coba sterilisasi bandeng presto dan ketam isi



Pendampingan di Kabupaten Karanganyar



Pendampingan di Kota Bandung



Pendampingan di Kabupaten Gresik



Pendampingan di Kabupaten Bekasi

Pendampingan di Kabupaten Kapuas

Gambar 8. Dokumentasi kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I telah ditindaklanjuti. Petunjuk teknis Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Permasalahan telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 2 Mei 2023.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp324.627.997,- atau setara dengan 27,05% dari total pagu sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3.2.5

Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja.

IK 6. Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)

Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk. Bagi produsen, standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Pemberlakuan SNI secara wajib telah ditetapkan untuk dua produk hasil perikanan, yaitu SNI Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng dan SNI Tuna dalam kemasan kaleng. Pemberlakuan SNI secara wajib tersebut memerlukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk memastikan dan memberikan sertifikat bahwa produk telah sesuai dengan SNI. Ditjen PDSPKP melalui BBP3KP sebagai LSPro-HP memiliki peran yang penting dalam melakukan sertifikasi terhadap produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng dan tuna dalam kemasan kaleng.

Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut diproduksi oleh suatu unit pengolahan yang telah mendapat Sertifikat Kesesuaian, Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi secara kontinu, dan proses produksi serta produknya memenuhi persyaratan sesuai SNI. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPro-HP merupakan lembaga sertifikasi yang berada di BBP3KP yang bergerak pada sertifikasi produk pengolahan hasil perikanan. LSPro-HP ini sudah terakreditasi KAN. LSPro-HP BBP3KP juga ditunjuk sebagai LSPro yang menerbitkan

SPPT SNI untuk produk tuna, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng yang diberlakukan secara Wajib.

Proses sertifikasi produk terdiri dari pengajuan sertifikasi, evaluasi sesuai skema (pemeriksaan proses produksi dan pengambilan contoh, pengujian contoh, tindakan perbaikan), tinjauan hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat. Selama masa berlaku sertifikat (4 tahun), LSPro-HP melakukan surveilan untuk memastikan bahwa proses produksi dan produk klien sertifikasi tetap sesuai dengan persyaratan SNI. Sistem manajemen lembaga sertifikasi produk (SNI ISO/IEC 17065) yang diterapkan harus dipelihara supaya selalu sesuai dengan persyaratan standarnya masing-masing. Pemeliharaan sistem ini dilakukan melalui antara lain audit internal, kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen dan rapat *governing board*.

Sasaran produk yang disertifikasi didasarkan pada ruang lingkup sertifikasi LSPro-HP yang telah diakreditasi oleh KAN per tanggal 6 Desember 2021 yaitu meliputi produk (1) baso ikan beku, (2) kerupuk ikan, (3) ikan asin kering, (4) bandeng presto, (5) bandeng cabut duri, (6) abon ikan, (7) sarden dan makarel dalam kemasan kaleng, (8) tuna dalam kemasan kaleng, (9) naget ikan, (10) otak-otak ikan, (11) pempek ikan rebus beku, (12) siomay ikan, (13) amplang ikan, (14) ikan pindang, (15) surimi, (16) bandeng isi, (17) ikan renyah, (18) fillet patin beku, (19) udang beku, (20) kerupuk ikan/udang/moluska siap makan. Selain layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan, BBP3KP juga melakukan pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065.

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 1 Layanan. Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain: (1) koordinasi pelaksanaan evaluasi, survailen dan resertifikasi, (2) resertifikasi produk abon ikan (UKM Usaha Mandiri), (3) evaluasi sertifikasi awal produk bakso ikan (UKM Bale Bahari), otak-otak ikan (UD Star Food), pempek ikan (CV Honey Group), produk bakso ikan (CV Samara Food), siomay ikan dan nugget ikan (CV Samara Food) (4) surveilan produk pempek (UKM Kenanga f12), bandeng cabut duri beku (UKM 88 Marijo), siomay ikan PT Chipsy Ludmila Indonesia, sarden dalam kemasan kaleng (PT Sari Laut Jaya Food Products), (5) evaluasi resertifikasi produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng (PT Mexindo Mitra Perkasa).



Evaluasi sertifikasi awal produk pempek ikan CV Honey Group



Evaluasi sertifikasi awal produk produk bakso ikan, siamay ikan dan naget ikan CV Samara Food



Surveilan produk bandeng cabut duri beku UKM 88 Marijo di Pinrang



Evaluasi sertifikasi awal produk bakso ikan UKM Bale Bahari

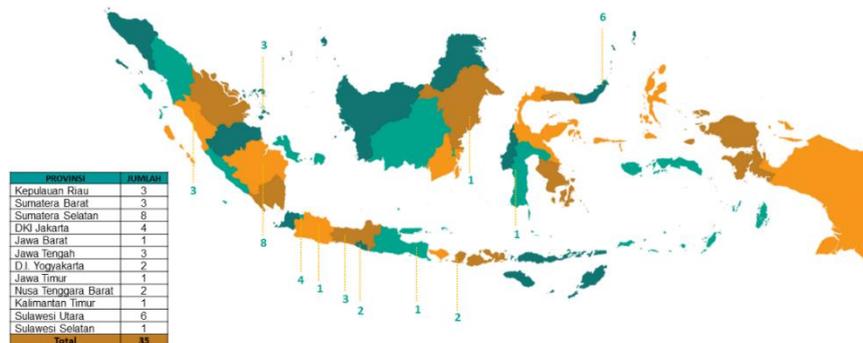


Assessment oleh KAN



Gambar 9. Kegiatan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan

Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 2. Sebaran lokasi UPI Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan terhadap SNI

Pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065, pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan BBP3KP antara lain yaitu (1) persiapan dokumen persyaratan pelaksanaan surveilan LSPro HP BBP3KP yang akan dilaksanakan oleh KAN. Dokumen yang sedang disiapkan terdiri dari pemutahiran ruang lingkup LSPro HP, dokumen panduan mutu, prosedur, rekaman, (2) witness, evaluasi dan pengambilan contoh dalam rangka surveilan kedua terhadap PT. Chipsy Ludmilla Indonesia, (3) *assessment* KAN dalam rangka Surveilan LSPro-HP BBP3KP yang berlangsung tanggal 26 - 27 Juni 2023 diselenggarakan di Ruang Rapat Laboratorium BBP3KP.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait sertifikasi yaitu Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya terhadap SNI dengan target 80 produk, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra. Nomenklatur terkait sertifikasi pada Renstra yaitu Jumlah Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan dengan target pada tahun 2023 sebesar 90 produk.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp348.796.074,- atau setara dengan 38% dari total pagu sebesar Rp917.850.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

IK 7. Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)

Produk perikanan secara umum perlu diuji nutrisi dan mutunya karena produk tersebut telah mengalami proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan-bahan non ikan, seperti tepung dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dari sudut pandang konsumen, ketersediaan data nutrisi dan mutu memberi kesempatan bagi

mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, ketersediaan data nutrisi dan mutu produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari produk tersebut.

Uji nutrisi dan mutu produk hasil perikanan telah dilaksanakan oleh BBP3KP sejak tahun 2010. Pada tahun 2023, kegiatan ini meliputi pengujian contoh produk klien LS Pro-HP untuk proses sertifikasi, contoh produk perikanan sebagai data dukung penyusunan RSNI, contoh produk dari tenant binaan inkubasi bisnis, tenant binaan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, contoh produk eksternal dan contoh produk dari UPI/pasar/pelabuhan yang disampling oleh personil laboratorium yang ditugaskan. Selain itu pada tahun 2023, BBP3KP juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025.

Ketersediaan data uji diharapkan dapat membantu pelaku usaha pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain itu, hasil pengujian nutrisi dan mutu juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan Ditjen PDSPKP, misalnya dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil) melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 1 Layanan. Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas yaitu telah dilakukan pengujian terhadap 145 produk dengan total data yang telah dihasilkan sebanyak 614 data uji. Data jenis produk yang telah diuji disajikan pada Lampiran 3. Pemeliharaan sistem manajemen mutu dan persyaratan teknis laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 juga telah dilakukan BBP3KP pada Triwulan II antara lain (1) melaksanakan uji pendahuluan pemeliharaan panelis standar produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng, (2) menyiapkan bakteri control positif, (3) pengumpulan data dan literatur terkait metode uji E.coli dan coliform menggunakan ISO 9308-1:2014, (3) pelaksanaan uji profisiensi FAPAS untuk parameter uji proksimat, (4) uji kesiapan alat manifold, (5) uji pendahuluan rasa dasar kepada panelis, dan (6) pengumpulan data dan literatur terkait metode uji E.coli dan coliform menggunakan ISO 9308-1:2014



Gambar 11. Kegiatan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Tabel 9. Pencapaian Indikator Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait pengujian yaitu Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji dengan target 360 produk, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra. Nomenklatur terkait pengujian pada Renstra yaitu Jumlah Data Hasil Pengujian Nutrisi dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan target pada tahun 2023 sebesar 1.300 data uji.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp212.836.928,- atau setara dengan 17,74% dari total pagu sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3.2.6

Sasaran Kegiatan 6 Nilai PNBK Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Nilai PNBK Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 8. Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SubSektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/ruang lingkup PNBP antara lain: pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya. Dasar hukum PNBP yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,585 M. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN, capaian indikator kinerja ini yang bersumber dari BBP3KP telah mencapai Rp428.539.000,-. Nilai tersebut setara dengan 73,21% terhadap target tahun 2023.

Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya yaitu sebesar Rp95.110.000,- dan dari penggunaan sarana dan prasarana oleh stakeholder, yaitu pemanfaatan ruangan, sewa ruang pameran, kolam, akuarium, bak *fiber glass* sebesar Rp333.429.000,-.

Tabel 10. Pencapaian Indikator Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0,585	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu Rp0,82M. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, belum terdapat realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dengan alokasi pagu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3.2.7

Sasaran Kegiatan 7

Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 9. Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tenaga kerja yang terlibat merupakan jumlah tenaga kerja yang menerima manfaat dari kegiatan Inkubasi Bisnis di BBP3KP dan tenaga kerja yang menerima manfaat dari kegiatan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah mempersiapkan rencana penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan inkubasi bisnis dan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan di BBP3KP. Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

Tabel 11. Pencapaian Indikator Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3.684 orang. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, belum terdapat realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dengan alokasi pagu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3.2.8

Sasaran Kegiatan 8 Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja.

IK 10. Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pemberkasan arsip pada aplikasi e-Layar dan monitoring dan evaluasi sistem informasi kearsipan di GMB KKP tanggal 13 April 2023.
2. Pelaksanaan pemusnahan arsip di Lingkungan BBP3KP di PT. Paraduta Buanasentosa oleh tim arsip BBP3KP tanggal 05 Mei 2023.
3. Ikut serta kegiatan briefing penerapan tata naskah dinas di GMB KKP tanggal 19 Mei 2023.
4. Pelaksanaan kegiatan persiapan dan asistensi pengumpulan Dokumen Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2023 di Record Center Ditjen PDSPKP, Cibinong tanggal 09 Juni 2023.
5. Pelaksanaan kegiatan pemberkasan arsip aktif dan pemindahan arsip inaktif secara elektronik pada Aplikasi Elayar tanggal 13 Juni 2023.
6. Pelaksanaan kegiatan Benchmarking Pengelolaan Arsip dan Persuratan yang sesuai dengan kaidah kearsipan di D.I Yogyakarta tanggal 14-16 Juni 2023.
7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dokumen penilaian pengawasan kearsipan tahun 2023 di GMB KKP tanggal 23 Juni 2023.
8. Pelaksanaan kegiatan penginputan berkas arsip aktif selama triwulan II.





Gambar 12. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Arsip

Tabel 12. Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 94,74. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp31.031.477,- atau setara dengan 24,10% dari total pagu sebesar Rp128.787.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

IK 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah sebutan atau predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pada Tahun 2019, BBP3KP memperoleh predikat menuju WBK oleh tim penilai internal KKP. Untuk mempertahankan nilai tersebut diperlukan konsistensi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP (TPI) dan KemenPAN-RB (TPN). Pada Tahun 2021, BBP3KP juga telah memenuhi syarat WBK dengan nilai 82,21 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44,55 dan komponen hasil sebesar 37,66. Dalam komponen pengungkit terdapat 4 area yang memenuhi syarat WBK dan 2 area yang memenuhi syarat WBK/WBBM, yaitu area penataan sistem manajemen SDM Aparatur dan area penguatan akuntabilitas. Namun BBP3KP masih belum lolos penilaian TPN. Pada tahun 2022, BBP3KP tidak dilakukan penilaian TPI.

Pada Tahun 2023, Tim Pelaksana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBP3KP yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Tim Nomor B.34/BBP3KP/KP.440/I/2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pemenuhan kriteria penilaian Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai BBP3KP. Dalam memperkuat pengawasan, BBP3KP juga membentuk tim penanganan pengaduan, tim unit penanganan gratifikasi, dan tim penanganan benturan kepentingan.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBP3KP setiap bulan;
- b. Melakukan *morning briefing* RB lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Senin minggu pertama dan lingkup BBP3KP dilaksanakan hari Senin minggu kedua; dan
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 lingkup BBP3KP di Exhibition Hall Raiser Ikan Hias Cibinong tanggal 04 April 2023.



Gambar 13. Kegiatan persiapan dan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

Tabel 13. Pencapaian Indikator Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 84,57. Indikator kinerja terkait WBK yang tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 memiliki nomenklatur Unit Kerja yang Berpredikat menuju WBK dengan target 4 Unit Kerja,

sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

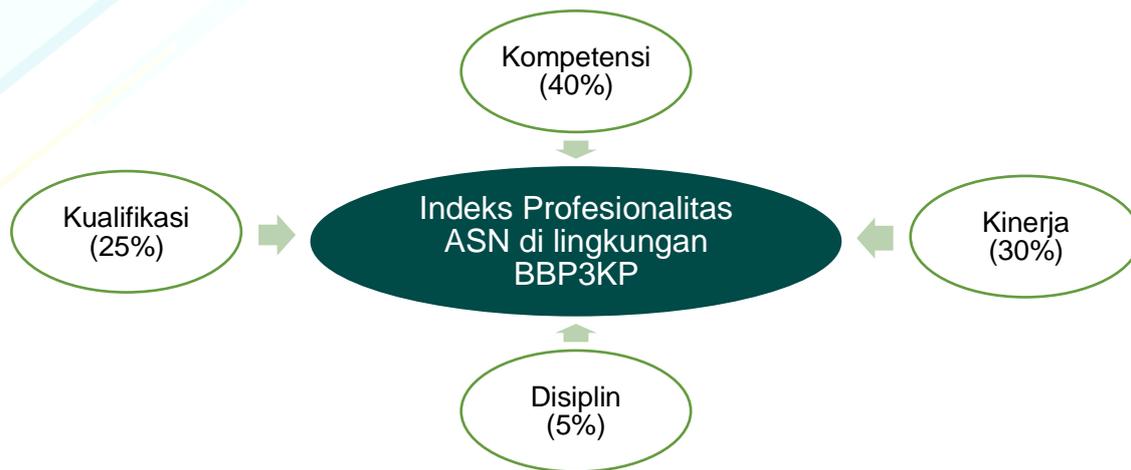
Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp49.748.320,- atau setara dengan 33,44% dari total pagu sebesar Rp148.765.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

IK 12. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Bobot komponen penilaian IP ASN dapat dilihat pada Gambar 14.

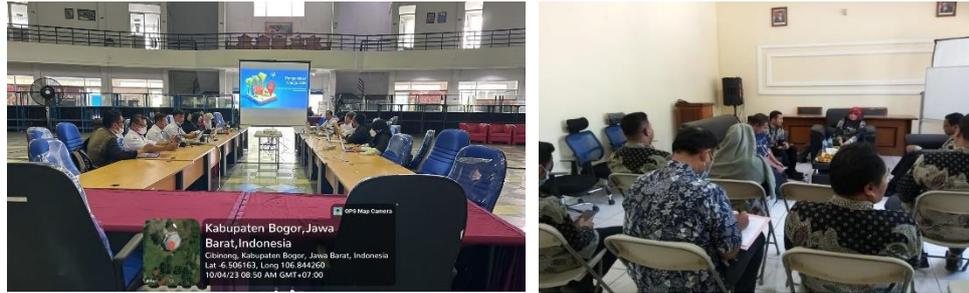


Gambar 14. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP

Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP. Pada tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode semesteran, berdasarkan pemantauan pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id/>.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian tahun 2023 di Ruang Rapat Surimi BBP3KP tanggal 26 April 2023.
2. Ikut serta dalam kegiatan penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi lingkup KKP di GMB KKP tanggal 05 Mei 2023.
3. Ikut serta kegiatan Rapat Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS (*Talent Pool*) di Kantor Regional BKN V tanggal 17 - 30 Mei 2023.
4. Pelaksanaan pengambilan data penentuan Nilai Ambang Batas JF bidang Kelautan dan Perikanan melalui Uji Materi tanggal 08 Juni 2023.
5. Ikut serta kegiatan pembahasan usulan proses bisnis, tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 15 Juni 2023.
6. Ikut serta dalam kegiatan pemaparan kebijakan KKP terkait penataan Jabatan Pelaksana dan persiapan tindak lanjut penataan Jabatan Pelaksana lingkup Ditjen PDSPKP di Raiser Ikan Hias Cibinong tanggal 16 Juni 2023.



Gambar 15. Kegiatan peningkatan profesionalitas ASN BBP3KP

Tabel 14. Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82,9	76	76	80,57	97,19	106,01	106,01	71,13	13,27

Indikator kinerja di atas diukur dengan periode perhitungan semesteran. Pada Triwulan II 2023, capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP adalah 80,57. Capaian ini setara dengan 106,01% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 76 atau 97,19% terhadap target tahun 2023 yakni 82,9.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp77.739.761,- atau setara dengan 22,16% dari total pagu sebesar Rp350.738.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

IK 13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja

jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai PM SAKIP BBP3KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BBP3KP merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Unit Eselon I.

Pada Triwulan II, kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas diantaranya:

- a. Telah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang disahkan oleh Direktur Jenderal PDSPKP, Budi Sulisty, tanggal 13 April 2023. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang akan mempengaruhi penilaian pada aspek perencanaan kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.
- b. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan.
- c. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan secara tepat waktu yakni paling lambat 21 hari setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi.
- d. Ikut serta pembahasan Penilaian Mandiri SAKIP (PMSAKIP) lingkup Ditjen PDSPKP di Gedung Mina Bahari III tanggal 23 Juni 2023.
- e. Mengikuti kegiatan *sharing session* Pengelolaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 Juni 2023.



Gambar 16. Kegiatan dialog kinerja organisasi dan penyusunan dokumen PK

Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80,5	-	84,75	-	-	-	-	-	

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni 84,75.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp23.222.000,- atau setara dengan 14,03% dari total pagu sebesar Rp145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

IK 14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK BBP3KP tahun 2022}}{\text{Jumlah realisasi anggaran BBP3KP tahun 2022}} \times 100$$

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah dengan melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban Triwulan II Tahun 2023 untuk meminimalisir adanya temuan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat permasalahan yang ditemui.

Tabel 16. Pencapaian Indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0,5	-	-	-	-	-	-	-	

Pada Triwulan II 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait temuan LHP BPK-RI yaitu Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BBP3KP dengan target 75%, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 karena tidak tercantum di dalamnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp3.688.000,- atau setara dengan 16,46% dari total pagu sebesar Rp24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

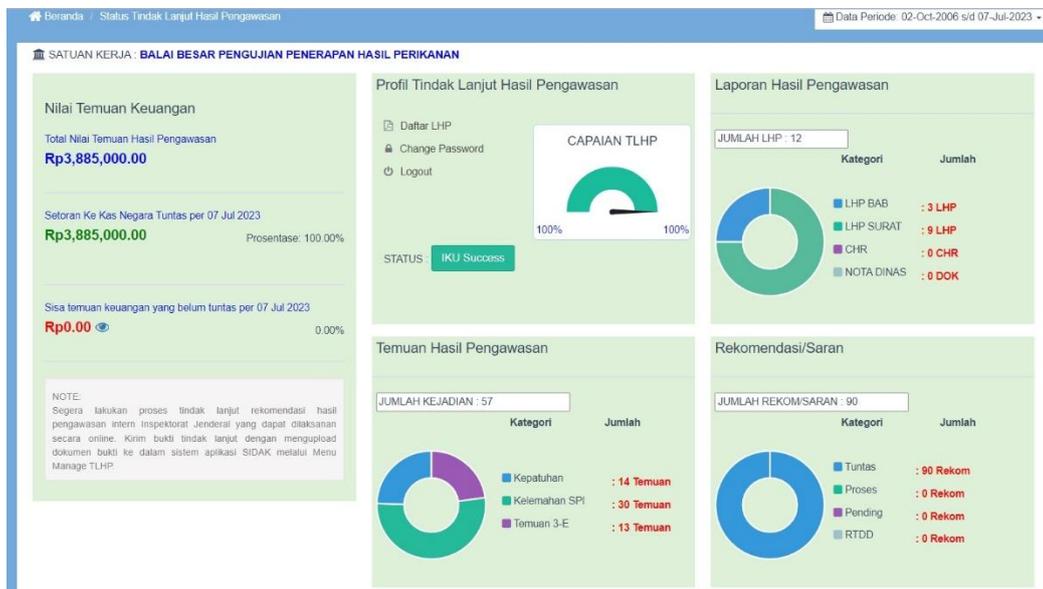
IK 15. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BBP3KP merupakan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BBP3KP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d 31 September 2022 atau Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja BBP3KP.

Sejak akhir tahun 2019, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan melalui aplikasi Sidak KKP. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBP3KP}} \times 100$$

Kegiatan pendukung dalam upaya mencapai indikator kinerja ini adalah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang diberikan Itjen. Tangkapan layar aplikasi SIDAK pada Triwulan II disajikan pada Gambar 20.



Gambar 17. Tangkapan Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Tahun 2023

Pada Triwulan II Tahun 2023, berdasarkan aplikasi Sidak KKP capaian tindak lanjut hasil pengawasan BBP3KP mencapai 100%. Dari 3 LHP terdapat 57 temuan dengan 90 rekomendasi. Dari 90 rekomendasi tersebut telah dinyatakan tuntas.

Tabel 17. Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75	75	80	100	133,33	133,33	125	97	3,09

Pada Triwulan II Tahun 2023, capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP adalah 100%. Capaian ini setara dengan 133,33% terhadap target tahun 2023 yakni 75 atau 125% terhadap target jangka menengah tahun 2024 yakni 80.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp5.278.100,- atau setara dengan 70,37% dari total pagu sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

IK 16. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)

Berdasarkan **Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021**, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Terdapat dua aspek penilaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP yaitu aspek penilaian kelompok umum dan aspek penilaian kelompok khusus. Aspek penilaian kelompok umum terdiri atas: (a) ringkasan (5%); (b) ide inovatif (20%); (c) signifikansi (25%); (d) kontribusi terhadap capaian TPB (5%); (e) adaptabilitas (20%); (f) keberlanjutan (20%); dan (g) kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus terdiri atas: (a) pembaruan / peningkatan Inovasi (25%); (b) adaptabilitas (20%); (c) penguatan keberlanjutan (25%) dan (d) evaluasi (30%). Formula pengukuran indikator kinerja ini yaitu Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I, dengan target hasil yaitu proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBP3KP memiliki program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-Kape). Sasaran

program Invapro Kape BBP3KP adalah pelaku usaha produk kelautan dan perikanan untuk menumbuhkembangkan UMKM yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian, pembangunan jiwa kewirausahaan yang inovatif serta penerapan pola manajemen usaha yang baik. Hingga 2023, sebanyak 104 UMKM dari 21 provinsi menjadi tenant Invapro Kape.

Tahapan kegiatan Invapro Kape terdiri dari pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Tahap pra inkubasi merupakan proses seleksi calon tenant yang terdiri dari seleksi administrasi, verifikasi, penilaian performa berdasarkan komitmen, kompetensi, rencana bisnis, dan rencana pengembangan usaha, serta penetapan tenant. Dilanjutkan dengan tahap inkubasi, dimana tenant mendapatkan pendampingan intensif dan fasilitasi yang dilakukan dalam periode tertentu, melalui 3 kali kelas pengembangan produk, 56 kali pembinaan penerapan jaminan mutu, 10 kali workshop manajemen usaha dan keuangan, fasilitasi pengajuan perizinan berusaha, sertifikasi produk, fasilitasi pengembangan desain, pencetakan 1.000-4.000 pc kemasan, media promosi, dan perluasan pemasaran. Pada tahap pasca inkubasi, tenant akan dievaluasi sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Tenant yang memenuhi syarat akan mendapatkan sertifikat kelulusan sebagai UMKM inovatif, mandiri, dan berdaya saing. BBP3KP tetap melakukan komunikasi, layanan konsultasi, dan pembinaan terhadap Tenant mandiri agar usahanya tetap berkelanjutan dan berkembang.

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas yaitu (a) melakukan penyusunan proposal inovasi Invapro Kape, dan (b) pengunggahan dokumen proposal pada website <https://sinovik.menpan.go.id/>. Adapun kegiatan Inkubasi Bisnis yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada IKK 4.

Tabel 18. Pencapaian Indikator Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renstra

BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp6.925.000,- atau setara dengan 3,34% dari total pagu sebesar Rp207.150.000,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

IK 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran (data kontrak, pengelolaan UP/TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM);
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D); dan
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA (kesalahan SPM, dan perencanaan kas).

Pada Tahun 2023 terdapat reformulasi IKPA sebagai berikut :



Gambar 18. Reformulasi IKPA 2023

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah dengan optimalisasi SPI BBP3KP. Diharapkan dengan SPI yang optimal seluruh komponen yang menjadi bobot penilaian IKPA dapat dioptimalkan pencapaiannya. Selain itu juga dilakukan penginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI secara tepat waktu.

Langkah-langkah yang akan ditempuh guna meningkatkan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran BBP3KP, antara lain:

- a. Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran:
 - melakukan revisi DIPA secara selektif dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran;
 - memastikan pelaksanaan anggaran berjalan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
 - melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
 - mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- b. Pada aspek kepatuhan atas regulasi:
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data supplier dan data kontrak. Data kontrak disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani/tanggal kontrak);
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP;
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara. (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);

- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian SPM terutama pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.
- c. Pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan:
 - meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D;
 - mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan;
 - memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai. SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- d. Pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan:
 - meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
 - meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.

Tabel 19. Pencapaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89	82	90	93,10	104,61	113,54	103,44	86,86	7,18

Indikator kinerja di atas diukur dengan periode perhitungan semesteran. Pada Triwulan II 2023, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP adalah 93,10. Capaian ini setara dengan 113,5% terhadap target triwulan II tahun 2023 yakni 82 atau 104,6% terhadap target tahun 2023 yakni 89.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp69.578.864,- atau setara dengan 30,46% dari total pagu sebesar Rp228.460.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

IK 18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan

output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penghitungan NKA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (P \times WP) + (K \times Wk) + (PK \times WPK) + (E \times WE)$$

Keterangan:

NKA	:	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PDSPKP
P	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker
WP	:	Bobot penyerapan anggaran sebesar 9,7%
K	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan
WK	:	Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 18,2%
PK	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran
WPK	:	Bobot pencapaian keluaran sebesar 43,5%
E	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran
WE	:	Bobot efisiensi sebesar 28,6%

Kegiatan yang dilakukan BBP3KP pada Triwulan II dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja di atas yaitu penginputan capaian output melalui aplikasi SAKTI yang saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput.

Tabel 20. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86	-	89	-	-	-	-	-	

Pada Triwulan II 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan capaiannya pada akhir tahun, dengan capaian tahun 2022 yaitu 86,21 dan terhadap target jangka menengah tahun 2024 yaitu 89.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp60.909.500,- atau setara dengan 40,61% dari total pagu sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

IK 19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BBP3KP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BBP3KP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Unit Eselon I dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Aspek Market (40%)
2. Aspek Demand (60%)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dihitung dari jumlah nilai Aspek Market dan Aspek Demand. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

Kegiatan yang telah dilakukan BBP3KP dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja di atas pada triwulan II yaitu penyusunan spesifikasi 4 (empat) unit AC dan 10 (sepuluh) unit meubelair.

Tabel 21. Pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) TW II 2022- TW II 2023
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BBP3KP merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan penilaian mandiri masing-masing unit kerja dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp206.221.500,- atau setara dengan 19,64% dari total pagu sebesar Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

IK 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Pada Triwulan II, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas yaitu:

- a. Perbaikan server internet mikrotik di Jakarta tanggal 02 April 2023.
- b. Pelaksanaan kegiatan lelang peralatan dan mesin BBP3KP di KPKNL Jakarta II tanggal 05 April 2023.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembahasan catatan hasil revidi usulan perubahan RKBMN Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2023 di GMB KKP tanggal 12 April 2023.
- d. Koordinasi pengelolaan Mobil ATI Eks Forikan Pusat di GMB KKP tanggal 17 Mei 2023.
- e. Menghadiri kegiatan diskusi pendetilan persediaan dan aset tetap pada aplikasi SAKTI di GMB KKP tanggal 29 Mei 2023.
- f. Ikut serta rekonsiliasi internal, rekonsiliasi eksternal dan pemrosesan data BMN periode Januari sampai dengan Mei Tahun 2023 di GMB KKP tanggal 31 Mei 2023.
- g. Ikut serta kegiatan monev dan perbaikan data SAKTI periode Januari – Mei serta identifikasi selisih data tahun 2022 di Ruang Rapat Raiser Ikan Hias Cibinong tanggal 13 Juni 2023.
- h. Pelaksanaan kegiatan pengecekan fisik bersama instalasi karantina ikan di Satker BBP3KP Cibinong tanggal 23 Juni 2023.



Gambar 19. Kegiatan BMN Triwulan II Tahun 2023

Tabel 22. Pencapaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW II 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW II 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW II 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan II 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini

nantinya dapat dibandingkan capaiannya pada akhir tahun, dengan capaian tahun 2022 yaitu 91,5. Indikator kerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp22.125.260,- atau setara dengan 20,11% dari total pagu sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBP3KP pada Triwulan I Tahun 2023 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBP3KP Nomor: DIPA-032.06.2.427686/2022 tanggal 30 November 2022 dengan pagu yaitu Rp35.970.109.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang semuanya merupakan rupiah murni.

Realisasi Anggaran BBP3KP per Rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 23. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan

Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
5279. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5279.ADA.001 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	300.000.000	88.876.592	211.123.408	29,63
	5279.AEF.001 Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP	1.000.000.000	213.363.736	786.636.264	21,34
	5279.BAH.001 Layanan Sertifikasi Produk	1.125.000.000	348.796.074	776.203.926	31,00
	BAH.002 Layanan Pengujian Produk	1.200.000.000	212.836.928	987.163.072	17,74
	5279.QDG.001 UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	3.500.000.000	1.733.231.773	1.766.768.227	49,52
	5279.QDG.002 UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	1.200.000.000	324.627.997	686.421.003	32,11
	2361.CAN.051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	150.000.000	104.398.000	45.602.000	69,60
	2361.EBA.962 Layanan Umum	600.000.000	155.091.058	444.908.942	25,85
	2361.EBA.994 Layanan Perkantoran	25.295.109.000	9.966.723.904	15.928.385.096	38,49
	2361.EBB.951	900.000.000	92.722000	807.278.000	10,30

Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
	Layanan Sarana Internal				
	2361. EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	130.000.000	60.909.500	69.090.500	46,85
	2361.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	170.000.000	23.222.000	146.778.000	13,66
	2361.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	400.000.000	113.200.000	286.799.776	28,30
JUMLAH		35.970.109.000	13.282.908.728	22.687.200.272	36,93

Pada Triwulan II Tahun 2023, penyerapan anggaran BBP3KP adalah Rp13.282.908.728,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh dua sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau setara dengan 36,93% terhadap total pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja periode Triwulan II Tahun 2023, beberapa indikator kinerja yang memiliki target Triwulanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja BBP3KP, telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai target indikator kinerja.

Secara umum, indikator kinerja BBP3KP yang dapat dihitung pada triwulan II tahun 2023 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 116,62%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum realisasi seluruh output kegiatan telah tercapai, bahkan melebihi target. Namun ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Pada saat rapat teknis RSNI 2 bulan Juni, Komtek meminta tambahan data dukung berupa foto produk langsung dari UPI, serta alur proses produksi dijabarkan untuk masing-masing komoditas (cumi-cumi, sotong dan gurita). Rekomendasi atas permasalahan yaitu dilakukan identifikasi dan pengumpulan data terkait Bahan RSNI Sefalopoda Beku.
2. Pelaksanaan evaluasi dan surveilan klien LSPro mundur dari jadwal yang telah ditetapkan karena permintaan klien. Rekomendasi atas permasalahan yaitu dilakukan penjadwalan ulang.

4.3. Tindak Lanjut

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Rekomendasi: Melakukan monitoring pencapaian kinerja terhadap target yang telah direncanakan.

Telah ditindak lanjuti dengan dilakukan permintaan capaian kinerja per bulan kepada penanggung jawab kegiatan terkait, rapat pemantauan pimpinan lingkup BBP3KP secara berkala, pengisian evaluasi rencana aksi dan matriks capaian IKK per triwulan.

2. Rekomendasi: Melakukan penyusunan media informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Telah ditindak lanjuti dengan menyusun, mendesign, mencetak, dan menyebarkan media informasi secara rutin. Adapun media informasi yang telah diterbitkan diantaranya leaflet (Inkubasi Bisnis, Permen Rumput Laut, Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan, dan Bath Salt Bomb), banner (Satker BBP3KP Ambon, Kegiatan Pembinaan Pendampingan dan Fasilitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja Satker BBP3KP di Ambon), dan panel (Layanan Sertifikasi SNI, dan Inkubasi Bisnis Invapro KP)

3. Rekomendasi: Mengumpulkan hasil uji laboratorium yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RSNi dalam menentukan syarat mutu dan keamanan pangan suatu produk.

Telah ditindak lanjuti dengan mengumpulkan data hasil uji laboratorium.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang

Lampiran 1.
Salinan revisi PK Level 2
BBP3KP Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 15
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMARAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Trisna Ningsih**
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : **Budi Sulistyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 April 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistyo

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan

Trisna Ningsih

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3
3	Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50
		Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
		Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
6	Nilai PNPB Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP	Nilai PNPB di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0,585
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450
KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN Penguatan Daya Saing PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN			
8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP	Nilai Pengawasan Keasrian di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75
		Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75

12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82,9
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80,5
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RJ di lingkungan BBP3KP (%)	≤0,5
15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75
16	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89
18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77,5
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77,5

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	27.645.109
Total Anggaran Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		35.970.109

Jakarta, 13 April 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistyo

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan

Trisna Ningsih

Lampiran 2
 Layanan Sertifikasi SNI Produk
 Kelautan dan Perikanan yang
 Dilaksanakan

Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

No	Nama Produk	Lokasi	Merek	Nama Klien
TW I				
1	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Jakarta, DKI Jakarta	dongwon	PT. Koin Bumi
2	Tuna dalam kemasan kaleng	Jakarta, DKI Jakarta	dongwon	PT. Koin Bumi
3	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	FRABELLE PANTAI MANADO SINAR	PT. Sinar Pure Food Internasional
4	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Batam, Kepulauan Riau	Po Sung	PT. Sumber Karya Sejati
5	Abon ikan	Yogyakarta	Khansa	UKM Khansa Snack & Food
6	Naget ikan	Rembang, Jawa Tengah	Ayasea	UKM Mina Food
7	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	SMS	PT. Samudera Mandiri Sentosa
8	Sarden dalam kemasan kaleng	Jakarta	ABC	PT. Heinz ABC Indonesia
9	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	TKS	PT. Carvinna Trijaya Makmur
10	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	Carvinna TKS	PT. Carvinna Trijaya Makmur
11	Pempek	Bekasi, Jawa Barat	Sauja	UKM Dapur Sauja
12	Pempek	Batam, Kepulauan Riau	Mang jai 788	UKM Mang Jai
13	Abon ikan	Purbalingga, Jawa Tengah	Marisa	Poklahsar Prima Melati
14	Bandeng duri lunak	Semarang, Jawa Tengah	Bandeng Juwana	PT. Bandeng Juwana
TW II				
15	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	SMS	PT. Samudera Mandiri Sentosa
16	Siomay ikan	Jakarta, DKI Jakarta	Chipsy	PT. Chipsy Ludmila Indonesia
17	Otak-otak ikan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	BOGATY	UKM Starfood
18	Saden dalam kemasan kaleng	Banyuwangi, Jawa Timur	Biltan Intan Daikin	PT. Sari Laut Jaya Food Products
19	Bandeng cabut duri beku	Pinrang, Sulawesi Selatan	88 Marijo	UKM 88 Marijo
20	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Honey	Pempek Honey

No	Nama Produk	Lokasi	Merek	Nama Klien
21	Bakso ikan	Payakumbuh, Sumatera Barat	Samara	Samara Food
22	Naget ikan	Payakumbuh, Sumatera Barat	Samara	Samara Food
23	Siomay	Payakumbuh, Sumatera Barat	Samara	Samara Food
24	Abon ikan	DIY Yogyakarta	Bonile	UKM Usaha Mandiri
25	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Kalani	CV. Pesona Musi
26	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Gending	CV. Pesona Musi
27	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Beringin	CV. Pesona Musi
28	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Lenggok	CV. Pesona Musi
29	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Yardan	CV. Pesona Musi
30	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Mama Musi	CV. Pesona Musi
31	Pempek	Palembang, Sumatera Selatan	Pempek Wawi	CV. Pesona Musi
32	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sulawesi Utara	DEHO	PT. Deho Canning Company
33	Bakso ikan	Mataram, Nusa Tenggara Barat		UKM Bale Bahari
34	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Batam, Kepulauan Riau	Nagos, Ayam Belanda, TSC, J&Y	PT. Mexindo Mitra Perkasa
35	Pempek	Bontang, Kalimantan Timur	Kenanga F12	UKM Kenanga F12

Lampiran 3
Layanan Pengujian Produk
Kelautan dan Perikanan yang
Dilaksanakan

Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
1.	PPU BBP3KP - Enza Lele	1.	Lele bumbu	Kadar Air	12
		2.	Lele fillet	Kadar Abu	12
2.	PPU BBP3KP - Dinari	3.	Otak otak ikan dengan sayur	Kadar Lemak	12
		4.	Otak-otak ikan	Kadar protein	12
3.	PPU BBP3KP - CV Bale Kreatif	5.	Egg roll cumi	Karbohidrat	12
		6.	Egg roll udang	Na	12
4.	PPU BBP3KP – CV Siluang Mina Nisa Bantul	7.	Nugget		
		8.	Cordon		
5.	PPU BBP3KP – Pawon Inak Inak	9.	Abon ikan		
		10.	Abon ikan		
6.	PPU BBP3KP – Karya Mandiri (BU BEDAH)	11.	Kerupuk cumi		
		12.	Abon ikan		
7.	Aurelia Putri - Universitas Pendidikan Indonesia	13.	Kerang hijau	Timbal (Pb)	3
		14.	Kerang hijau	Kadmium (Cd)	3
		15.	Kerang hijau		
8.	UD Family Food Gresik	16.	Siomay - Best Go	Kadar abu	1
		17.	Siomay - Best Go	ALT	5
		18.	Siomay - Best Go		
		19.	Siomay - Best Go		
		20.	Siomay - Best Go		
		21.	Siomay - Laras Food	Kadar air	1
		22.	Siomay - Laras Food	Kadar abu	1
		23.	Siomay - Laras Food	ALT	5
		24.	Siomay - Laras Food		
		25.	Siomay - Laras Food		
		26.	Siomay - Laras Food		
		27.	Bakso - Laras Food	Kadar air	3
		28.	Naget - Laras Food	Kadar abu	4
		29.	Otak otak - Best Go	Kadar protein	1
30.	Otak otak - Laras Food	ALT	1		
9.	UTTPP BBP3KP - RSNi	31.	Cumi utuh bangka beku	ALT	4
		32.	Baby squid beku	<i>E. coli</i>	4
		33.	Cumi sotong kupas beku	<i>Salmonella</i>	4
		34.	Gurita beku Octopus tako leg	<i>V. Parahaemolyticus</i>	4
10.	Uji Banding Buski	35.	UBC 04	<i>E. coli</i>	1
		36.	UBC 11	<i>Coliform</i>	1
		37.	UBE 11	<i>Enterococci intestinal</i>	1
		38.	UBE 20	<i>Enterococci intestinal</i>	1
11.	PT. Pesona Sari Bintang	39.	Tuna	ALT	5
		40.	Kembung		
		41.	Udang		
		42.	Tongkol		
		43.	Kakap		
12.		44.	Tuna	ALT	5

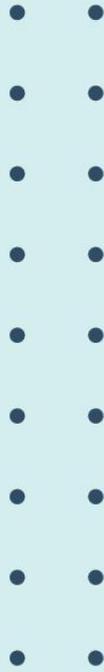
No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data			
	PT. Dua Putra Perkasa	45.	Kembung					
		46.	Udang					
		47.	Tongkol					
		48.	Kakap					
13.	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	49.	Tuna	ALT	7			
		50.	Kembung					
		51.	Udang					
		52.	Tongkol					
		53.	Kakap					
		54.	Cumi					
		55.	Patin/Dori					
14.	Mina Food Rembang	56.	Naget ikan – alisya	Merkuri (Hg)	1			
				Timbal (Pb)	1			
				Kadmium (Cd)	1			
				Arsen (As)	1			
				Timah Putih (Sn)	1			
				Kadar air	1			
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			
				ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>V. cholerae</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
Filth	1							
Sensori	1							
15.	PPU-Saputra Snack- Bontang	57.	Kulit Ikan Bandeng Crispy	Kadar air	23			
				PPU- Pawon Koe-Banyuwangi	58.	Rambak Baby Cumi	Kadar abu	23
						59.	Sambal Cumi kemangi	Kadar protein
16.	PPU-PT. Rumah Kuliner Indonesia - Batam	60.	Sambal Cumi Hobah	Kadar Lemak	23			
			61.	Sambal Ikan Asap	Karbohidrat	23		
17.	PPU-UKM Azzakhra – Maros, Sulawesi Selatan	62.	Bakso ikan tuna	Natrium	23			
			63.	Abon ikan tuna				
18.	PPU- AHA Food - Bone, Sulawesi Selatan	64.	Bakso ikan					
			65.	Otak-otak ikan				
19.	PPU-Bandeng Presto Bu Rita – Boyolali, Jawa Tengah	66.	Pepes Bandeng					
			67.	Stik Duri Bandeng				
20.	PPU-Jutsuka – Bulukumba, Sulawesi Selatan	68.	Ikan kering asin (Ikan katamba)					
			69.	Ikan Kannas (semacam ikan peda)				
21.	PPU-PT Rizki Prima Food – Kab. Bandung, Jawa Barat	70.	Ikan petek crispy					
22.	PPU- Mangathat – Kab. Malang, Jawa Timur	71.	Tuna Suwir					
			72.	Sambal Tuna				

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
23.	PPU-2 Koki – Mojokerto, Jawa Timur	73.	Kerupuk ikan (amplang)		
24.	PPU-Dapur Way Kanan – Way Kanan, Lampung	74.	Stik Ikan		
		75.	Abon Ikan		
25.	PPU-Alfitri – Garut, Jawa Barat	76.	Abon ikan patin		
		77.	Abon ikan mas		
26.	PPU- Olahan Ikan Nene Ahya – Konawe, Sulawesi Selatan	78.	Portunus kepiting isi		
		79.	Pempek		
27.	UKM DINARI	80.	Otak-otak Ikan	Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				ALT	1
				<i>E. coli</i>	1
				<i>Salmonella</i>	1
				<i>V. cholerae</i>	1
				<i>S. aureus</i>	1
				Filth	1
Sensori	1				
28.	PT SKS	81.	Makrel dalam kemasan kaleng	Histamin	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Merkuri (Hg)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				Filth	1
				Bobot Tuntas	1
				Parasit	1
				Sensori	1
29.	CS Muara Baru 2000 Ton	82.	Ikan Lencam beku	Sensori	1
		83.	Ikan bawal beku		1
		84.	Kakap merah beku		1
		85.	Anggoli beku		1
		86.	Kwe beku		1
		87.	Kembung		1
30.	CS Muara Baru 1000 Ton	88.	Kwe		1
		89.	Kakap merah beku		1
		90.	Kembung		1
		91.	Tongkol		1
31.	UKM Khansa Food	92.	Abon ikan	Histamin	1
				Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Kadar air	1
				Kadar protein	1
				Filth	1
				Sensori	1
ALT	5				
<i>E. coli</i>	5				
<i>Salmonella</i>	5				
<i>S. aureus</i>	5				
32.	CV Honey Group	98.	Pempek panggang	Kadar protein	4

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
		99.	Pempek adaan	Kadar air	4
		100.	Pempek lenjer	ALT	2
		101.	Pempek kulit	Filth	1
		102.	Otak-otak Ikan	Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar protein	1
				Kadar Lemak	1
				ALT	1
				<i>E. coli</i>	1
				<i>Salmonella</i>	1
				<i>V. cholerae</i>	1
				<i>S. aureus</i>	1
Filth	1				
Sensori	1				
33.	Poklalsar Prima Melati (MARISA)	103.	Naget Ikan	Merkuri (Hg)	2
		104.	Otak otak ikan	Timbal (Pb)	2
				Kadmium (Cd)	2
				Arsen (As)	2
				Timah Putih (Sn)	2
				Kadar air	2
				Kadar abu	2
				Kadar protein	2
				Kadar Lemak	2
				ALT	2
				<i>E. coli</i>	2
				<i>Salmonella</i>	2
				<i>V. cholerae</i>	2
				<i>S. aureus</i>	2
Filth	2				
Sensori	2				
34.	UTTPP BBP3KP - RSNI	105.	Ikan asin kering	ALT	4
		106.		<i>E. coli</i>	4
		107.		Kadar air	4
		108.		Kadar abu TLDA	4
				Kadar garam	4
35.	UPTD PMHP Lampung	109.	Bakso Ikan	Arsen (As)	1
36.	DJN Cookies – Kab. Cirebon, Jawa Barat - PPU BBP3KP	110.	Cheryl Cookies udang rebon	Kadar air	7
		111.	Keripik Rebon Squilla	Kadar abu	7
37.	Sarmila – Banyumas, Jawa Tengah - - PPU BBP3KP	112.	Nila Crispy	Kadar protein	7
	Fritzy Food Bakery – Cimahi, Jawa Barat - PPU BBP3KP	113.	Pizza	Kadar Lemak	7
	Rendang Uniadek – Agam,	114.	Rendang Tuna Suir	Karbohidrat	7

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
	Sumatera Barat - PPU BBP3KP				
	Rendang Uniadek – Agam, Sumatera Barat - PPU BBP3KP	115.	Tuna Suir	Natrium	7
	Fatih Kuliner – Tulang Bawang Barat, Lampung - PPU BBP3KP	116.	Siomay ikan gabus	<i>E. coli</i>	7
38.	PT Mitsui	117.	Makerel dalam saus tomat 425 g	Filth	3
		118.	Sarden dalam saus tomat 425 g	Bobot Tuntas	3
		119.	Sarden dalam saus tomat 155 g	Sensori	3
39.	Pesta F – AUP	120.	Pindang ikan tongkol (A)	Histamin	2
		121.	Pindang ikan tongkol (B)		
40.	UKM DINARI	122.	Otak-otak Ikan	Kadar protein	1
41.	PT Chipsey Ludmila Indonesia	123.	Air	<i>E. coli</i>	3
		124.	Air	<i>Coliform</i>	3
		125.	Es		
42.	CV global pangan sedulur Bandung	126.	Bandeng isi	ALT	5
		127.	Bandeng isi		
		128.	Bandeng isi		
		129.	Bandeng isi		
		130.	Bandeng isi		
43.	Ditpolairud Polda Metro Jaya	131.	Ikan Salem A	Formalin	2
		132.	Ikan Salem B		
44.	UTTPP BBP3KP – RSNI	133.	Amplang Ikan	Merkuri (Hg)	5
		134.	Amplang Ikan	Timbal (Pb)	5
		135.	Amplang Ikan	Kadmium (Cd)	5
		136.	Amplang Ikan	Arsen (As)	5
		137.	Amplang Ikan	Timah Putih (Sn)	5
				Kadar air	5
				Kadar abu	5
				Kadar Lemak	5
				Kadar protein	5
				ALT	5
				<i>S. aureus</i>	5
				Sensori	5
45.	UKM Yamois Indo Prima	138.	Siomay	Histamin	1
				Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar protein	1
				Kadar Lemak	1
				ALT	1
				<i>S. aureus</i>	1
				Filth	1
				Sensori	1
46.	Uji Profisiensi FAPAS	139.	Fish Paste	Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar protein	1
				Kadar Lemak	1

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
47.	PIM Muara Baru	140.	Ikan nila	Formalin	5
		141.	Ikan bandeng	Sensori	5
		142.	Ikan Kuwe		5
		143.	Ikan kembung		5
		144.	Ikan patin		5
		145.	Ikan nila	ALT	5
			Ikan bandeng	<i>E. coli</i>	5
			Ikan Kuwe	<i>Salmonella</i>	5
			Ikan kembung		
			Ikan patin		
Total Produk		145	Total data uji		614



BBP3KP

 Jl. Raya Setu No. 70, Kel. Setu, Kec Cipayung ,
Jakarta Timur, 13880

 021-84997969/ 84998429 Fax: 021-84999360

 kcp.go.id/djpdspkp/bbp2hp

 bbp3kp

 bbp3kp

 BBP3KP JAKARTA

